LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			% Capaian Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2025		Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/ permasalahan dalam pencapaian target kinerja	Tindak lanjut yang telah/ harus dilakukan	Program	Keg	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK				WTP	WTP	100%									1.Tindak Lanjut Rekomendasi BPK secara Konsisten: Menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (LKPD/LKKL): Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan meningkatkan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Perbaikan Manajemen Aset dan Inventaris: Melakukan inventarisasi, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) guna mengatasi masalah aset tetap yang sering menjadi temuan.	1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan diantaranya temuan berulang terkait ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. 2. Komitmen Pimpinan dan Manajemen : - Lemahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, sehingga temuan yang sama berulang setiap tahun. - Kurangnya komitmen pimpinan dalam pengawasan dan perbaikan administrasi keuangan.	1. Tindak Lanjut Administratif (Wajib) : Penyelesaian Rekomendasi 60 Hari : Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban/penjelasan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 2. Tindak Lanjut Substansial (Kerugian Negara) : Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: Jika ditemukan kerugian negara, instansi wajib menyetorkan ganti kerugian tersebut ke kas negara/daerah. 3. Upaya Mempertahankan WTP (Langkah Strategis) : Proaktif berkoordinasi dengan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi agar penyelesaiannya efektif dan efisien.	1. Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.	1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2.Dokumen RKPD dan RKPD-Perubahan 3. Dokumen RKA, RKA Revisi dan RKA - Perubahan. 4. Dokumen RAK dan RAK -perubahan 5. Dokumen DPA, DPA Revisi dan DPA - Perubahan 6. Dokumen Rencana Strategis (Renstra). 7, Laporan LKJiP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscuting dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 8. Laporan LPPD 9. Laporan LKPJ 10. Laporan LKPD 11. Laporan Evaluasi Triwulan 12. laporan Fisik dan Keuangan 13. laporan RANDA PUG. 14. Lapotan RTP. 15. Laporan Inovasi. 16. Laporan IPKD. 19. Laporan Perilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.	38 Dokumen	19 Dokumen	140.177.448,00	16.500.000,00	11,77
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel																				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Gaji dan Tunjangan ASN, 1. Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) . 2. LK OPD	12 Dokumen	3 Dokumen	14.008.112.151,88	1.926.956.470,00	13,76
																					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Dokumen DUK 2. Dokumen BUZZETING 3. Laporan Inventarisasi BMD 4. Dokumen data kepegawaian (bulanan) 5. Dokumen SKP 6. Dokumen LHKPN 7. Dokumen LHKASN 8. Dokumen SPT Tahunan	19 Dokumen	9 Dokumen	234.292.718,00	30.788.250,00	13,14
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah										78,77					1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) 2. Optimalisasi Pengalokasian Anggaran (Dimensi 2) 3. Peningkatan Transparansi dan Penatausahaan (Dimensi 3 & 4): 4. Perbaikan Akuntabilitas dan Pengawasan (Dimensi 6)				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tersedia alat listrik, pengadaan sarana dan prasarana, alat tulis kantor, bahan logistik kantor, cetak,makan minum tamu, rapat koordinasi dan konsultasi.	12 Bulan	3 Bulan	453.774.718,00	71.196.974,00	15,69
																					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah pengadaan mebel.	1 paket		134.062.045,00		-
																					6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah jasa pengiriman, materai, tagihan air dan listrik.	12 Bulan	3 Bulan	7.918.535.200,00	2.378.892.017,00	30,04
																					7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah pembayaran pajak kendaraan roda empat dan dua, BBM, kendaraan dinas yg dipelihara dan gedung kantor yg dipelihara.	12 Bulan	3 Bulan	446.400.458,00	42.763.772,00	9,58
																				2. Pengelolaan Keuangan Daerah.	1.Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.	1. Dokumen KUA 2. Dokumen PPAS 3. Dokumen Perubahan KUA 4. Dokumen Perubahan PPAS 5. Dokumen DPA 6. Dokumen Perubahan DPA 7. Dokumen Nota Keuangan 8. Dokumen Perda 9. Dokumen Perbup APBD 10. Dokumen Nota Keuangan 11. Dokumen Perda 12. Dokumen Perbup APBD Perubahan 13. Dokumen Perbup SHSB 14. Dokumen Perbup Subsidi 15. Dokumen Perbup BKK 16. Dokumen ASB-HSPK	16 dokumen	4 dokumen	1.856.989.844,00	329.547.448,00	17,75

																			2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah.	1. Rekon Kas Bulanan 2. Pencairan DAK Fisik 3. Pencairan DAK Non Fisik 4. SP2D 5. Surat Edaran	60 dokumen	15 dokumen	1.002.551.869,00	240.486.500,00	23,99
																			3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.	1. Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 2. LRA Konsolidasi Bulanan 3. Laporan Semester 4. LKPD TA 2024 5. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 6. Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 7. LHP BPK	29 Laporan	7 Laporan	664.544.846,00	202.027.786,00	30,40
																			4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.	ADN, DN, BTT, Penyaluran dana bagi hasil	4 Laporan	1 Laporan	172.498.986.669,00	73.953.517.681,00	42,87
																			5. Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.	Dokumen APBD, dokumen APBD perubahan, dokumen DPA, dokumen DPPA, dokumen KUA, dokumen perubahan KUA, dokumen PPAS dan dokumen perubahan PPAS.	41 OPD	41 OPD	508.439.624,00	189.156.789,00	37,20
																		3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1. Pengelolaan barang milik daerah.	1.SK SHSB 2. RK BMD 3. Laporan Penatausahaan BMD 4. Laporan Hasil Pengamanan BMD 5. Nilai Barang Hasil Pembongkaran 6. Nilai Barang Hasil Penjualan 7. Nilai Barang Hasil Sewa 8. Nilai Barang Hasil Pemusnahan 9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD 10. Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11. Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12. Laporan Barang Milik Daerah	13 Laporan	3 Laporan	1.413.592.628,00	123.529.881,00	8,74
Rata-rata capaian															25%	Rata-rata realisasi					201.280.460.218,88	79.505.341.568,00	39,50

Aro Suka, April 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY,SE.M.Si

NIP. 19700804 199803 1 006

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			% Capaian Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2025		Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/ permasalahan dalam pencapaian target kinerja	Tindak lanjut yang telah/ harus dilakukan	Program	Keg	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK				WTP	WTP	100%									1.Tindak Lanjut Rekomendasi BPK secara Konsisten: Menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (LKPD/LKKL): Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan meningkatkan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Perbaikan Manajemen Aset dan Inventaris: Melakukan inventarisasi, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) guna mengatasi masalah aset tetap yang sering menjadi temuan.	1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan diantaranya temuan berulang terkait ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. 2. Komitmen Pimpinan dan Manajemen : - Lemahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, sehingga temuan yang sama berulang setiap tahun. - Kurangnya komitmen pimpinan dalam pengawasan dan perbaikan administrasi keuangan.	1. Tindak Lanjut Administratif (Wajib) : Penyelesaian Rekomendasi 60 Hari : Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban/penjelasan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 2. Tindak Lanjut Substansial (Kerugian Negara) : Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: Jika ditemukan kerugian negara, instansi wajib menyetorkan ganti kerugian tersebut ke kas negara/daerah. 3. Upaya Mempertahankan WTP (Langkah Strategis) : Proaktif berkoordinasi dengan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi agar penyelesaiannya efektif dan efisien.	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.	1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2.Dokumen RKPD dan RKPD-Perubahan 3. Dokumen RKA, RKA Revisi dan RKA - Perubahan. 4. Dokumen RAK dan RAK -perubahan 5. Dokumen DPA, DPA Revisi dan DPA - Perubahan 6. Dokumen Rencana Strategis (Renstra). 7, Laporan LKJiP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscuting dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 8. Laporan LPPD 9. Laporan LKPJ 10. Laporan LKPD 11. Laporan Evaluasi Triwulan 12. laporan Fisik dan Keuangan 13. laporan RANDA PUG. 14. Lapotan RTP. 15. Laporan Inovasi. 16. Laporan IPKD. 19. Laporan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.	38 Dokumen	23 Dokumen	116.574.808,00	41.318.962,00	35,44
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel																				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Gaji dan Tunjangan ASN, 1. Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) . 2. LK OPD	12 Dokumen	6 Dokumen	18.819.634.240,33	3.973.860.735,00	21,12
																					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Dokumen DUK 2. Dokumen BUZZETING 3. Laporan Inventarisasi BMD 4. Dokumen data kepegawaian (bulanan) 5. Dokumen SKP 6. Dokumen LHKPN 7. Dokumen LHKASN 8. Dokumen SPT Tahunan	19 Dokumen	13 Dokumen	202.651.678,00	65.087.482,00	32,12
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah										78,77					1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) 2. Optimalisasi Pengalokasian Anggaran (Dimensi 2) 3. Peningkatan Transparansi dan Pertanggungjawaban (Dimensi 3 & 4): 4. Perbaikan Akuntabilitas dan Pengawasan (Dimensi 6)				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tersedia alat listrik, pengadaan sarana dan prasarana, alat tulis kantor, bahan logistik kantor, cetak,makan minum tamu, rapat koordinasi dan konsultasi.	12 Bulan	6 Bulan	226.110.627,00	150.486.610,00	66,55
																					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah pengadaan mebel.	1 paket		122.935.550,00		-
																					6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah jasa pengiriman, materai, tagihan air dan listrik.	12 Bulan	6 Bulan	7.788.027.992,00	3.579.835.363,00	45,97
																					7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah pembayaran pajak kendaraan roda empat dan dua, BBM, kendaraan dinas yg dipelihara dan gedung kantor yg dipelihara.	12 Bulan	6 Bulan	492.408.080,00	143.422.927,00	29,13
																				2. Pengelolaan Keuangan Daerah.	1.Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.	1. Dokumen KUA 2. Dokumen PPAS 3. Dokumen Perubahan KUA 4. Dokumen Perubahan PPAS 5. Dokumen DPA 6. Dokumen Perubahan DPA 7. Dokumen Nota Keuangan 8. Dokumen Perda 9. Dokumen Perbup APBD 10. Dokumen Nota Keuangan 11. Dokumen Perda 12. Dokumen Perbup APBD Perubahan 13. Dokumen Perbup SHSB 14. Dokumen Perbup Subsidi 15. Dokumen Perbup BKK 16. Dokumen ASB-HSPK	16 dokumen	8 dokumen	1.737.542.943,00	453.045.586,00	26,07

																				2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah.	1. Rekon Kas Bulanan 2. Pencairan DAK Fisik 3. Pencairan DAK Non Fisik 4. SP2D 5. Surat Edaran	60 dokumen	30 dokumen	926.351.943,00	390.532.695,00	42,16
																				3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.	1. Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 2. LRA Konsolidasi Bulanan 3. Laporan Semester 4. LKPD TA 2024 5. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 6. Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 7. LHP BPK	29 Laporan	15 Laporan	612.014.519,00	315.353.864,00	51,53
																				4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.	ADN, DN, BTT, Penyaluran dana bagi hasil	4 Laporan	2 Laporan	173.013.347.310,00	83.831.643.684,00	48,45
																				5. Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.	Dokumen APBD, dokumen APBD perubahan, dokumen DPA, dokumen DPPA, dokumen KUA, dokumen perubahan KUA, dokumen PPAS dan dokumen perubahan PPAS.	41 OPD	41 OPD	511.414.538,00	243.151.160,00	47,54
																			3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1. Pengelolaan barang milik daerah.	1.SK SHSB 2. RK BMD 3. Laporan Penatausahaan BMD 4. Laporan Hasil Pengamanan BMD 5. Nilai Barang Hasil Pembongkaran 6. Nilai Barang Hasil Penjualan 7. Nilai Barang Hasil Sewa 8. Nilai Barang Hasil Pemusnahan 9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD 10. Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11. Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12. Laporan Barang Milik Daerah	13 Laporan	7 Laporan	1.013.199.630,00	264.085.732,00	26,06
Rata-rata capaian															50%	Rata-rata realisasi							205.582.213.858,33	93.451.824.800,00	45,46

Aro Suka, Juli 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY, SE, M.Si

NIP. 19700804 199803 1 006

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			% Capaian Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2025		Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/ permasalahan dalam pencapaian target kinerja	Tindak lanjut yang telah/ harus dilakukan	Program	Keg	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK				WTP	WTP	100%									1.Tindak Lanjut Rekomendasi BPK secara Konsisten: Menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (LKPD/LKKL): Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan meningkatkan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Perbaikan Manajemen Aset dan Inventaris: Melakukan inventarisasi, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) guna mengatasi masalah aset tetap yang sering menjadi temuan.	1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan diantaranya temuan berulang terkait ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. 2. Komitmen Pimpinan dan Manajemen : - Lemahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, schingga temuan yang sama berulang setiap tahun. - Kurangnya komitmen pimpinan dalam pengawasan dan perbaikan administrasi keuangan.	1. Tindak Lanjut Administratif (Wajib) : Penyelesaian Rekomendasi 60 Hari : Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban/penjelasan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 2. Tindak Lanjut Substansial (Kerugian Negara) : Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: Jika ditemukan kerugian negara, instansi wajib menyetorkan ganti kerugian tersebut ke kas negara/daerah. 3. Upaya Mempertahankan WTP (Langkah Strategis) : Proaktif berkoordinasi dengan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi agar penyelesaiannya efektif dan efisien.	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.	1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2.Dokumen RKPD dan RKPD-Perubahan 3. Dokumen RKA, RKA Revisi dan RKA - Perubahan. 4. Dokumen RAK dan RAK -perubahan 5. Dokumen DPA, DPA Revisi dan DPA - Perubahan 6. Dokumen Rencana Strategis (Renstra). 7, Laporan LKJiP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscuting dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 8. Laporan LPPD 9. Laporan LKPJ 10. Laporan LKPD 11. Laporan Evaluasi Triwulan 12. laporan Fisik dan Keuangan 13. laporan RANDA PUG. 14. Lapotan RTP. 15. Laporan Inovasi. 16. Laporan IPKD. 19. Laporan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.	38 Dokumen	31 Dokumen	140.177.448,00	64.997.116,00	46,37
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel																				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Gaji dan Tunjangan ASN, 1. Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) . 2. LK OPD	12 Dokumen	9 Dokumen	14.008.112.151,88	5.374.419.300,00	38,37
																					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Dokumen DUK 2. Dokumen BUZZETING 3. Laporan Inventarisasi BMD 4. Dokumen data kepegawaian (bulanan) 5. Dokumen SKP 6. Dokumen LHKPN 7. Dokumen LHKASN 8. Dokumen SPT Tahunan	19 Dokumen	16 Dokumen	234.292.718,00	109.133.790,00	46,58
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah										78,77					1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) 2. Optimalisasi Pengalokasian Anggaran (Dimensi 2) 3. Peningkatan Transparansi dan Penatausahaan (Dimensi 3 & 4): 4. Perbaikan Akuntabilitas dan Pengawasan (Dimensi 6)				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tersedia alat listrik, pengadaan sarana dan prasarana, alat tulis kantor, bahan logistik kantor, cetak,makan minum tamu, rapat koordinasi dan konsultasi.	12 Bulan	9 Bulan	453.774.718,00	208.952.531,00	46,05
																					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah pengadaan mebel.	1 paket		134.062.045,00	53.041.754,00	39,57
																					6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah jasa pengiriman, materai, tagihan air dan listrik.	12 Bulan	9 Bulan	7.918.535.200,00	5.375.101.098,00	67,88
																					7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah pembayaran pajak kendaraan roda empat dan dua, BBM, kendaraan dinas yg dipelihara dan gedung kantor yg dipelihara.	12 Bulan	9 Bulan	446.400.458,00	241.206.896,00	54,03
																				2. Pengelolaan Keuangan Daerah.	1.Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.	1. Dokumen KUA 2. Dokumen PPAS 3. Dokumen Perubahan KUA 4. Dokumen Perubahan PPAS 5. Dokumen DPA 6. Dokumen Perubahan DPA 7. Dokumen Nota Keuangan 8. Dokumen Perda 9. Dokumen Perbup APBD 10. Dokumen Nota Keuangan 11. Dokumen Perda 12. Dokumen Perbup APBD Perubahan 13. Dokumen Perbup SHSB 14. Dokumen Perbup Subsidi 15. Dokumen Perbup BKK 16. Dokumen ASB-HSPK	16 dokumen	12 dokumen	1.856.989.844,00	982.671.657,00	52,92

																						2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah.	1. Rekon Kas Bulanan 2. Pencairan DAK Fisik 3. Pencairan DAK Non Fisik 4. SP2D 5. Surat Edaran	60 dokumen	45 dokumen	1.002.551.869,00	535.334.117,00	53,40
																						3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.	1. Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 2. LRA Konsolidasi Bulanan 3. Laporan Semester 4. LKPD TA 2024 5. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 6. Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 7. LHP BPK	29 Laporan	22 Laporan	664.544.846,00	510.957.507,00	76,89
																						4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.	ADN, DN, BTT, Penyaluran dana bagi hasil	4 Laporan	3 Laporan	166.148.986.669,00	120.571.681.632,00	72,57
																						5. Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.	Dokumen APBD, dokumen APBD perubahan, dokumen DPA, dokumen DPPA, dokumen KUA, dokumen perubahan KUA, dokumen PPAS dan dokumen perubahan PPAS.	41 OPD	41 OPD	508.439.624,00	317.373.193,00	62,42
																					3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1. Pengelolaan barang milik daerah.	1.SK SHSB 2. RK BMD 3. Laporan Penatausahaan BMD 4. Laporan Hasil Pengamanan BMD 5. Nilai Barang Hasil Pembongkaran 6. Nilai Barang Hasil Penjualan 7. Nilai Barang Hasil Sewa 8. Nilai Barang Hasil Penusnahan 9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD 10. Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11. Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12. Laporan Barang Milik Daerah	13 Laporan	10 Laporan	1.413.592.628,00	509.268.500,00	36,03
Rata-rata capaian																75%	Rata-rata realisasi								194.930.460.218,88	134.854.139.091,00	69,18

Aro Suka, Oktober 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY,SE.M.Si

NIP. 19700804 199803 1 006

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			% Capaian Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2025		Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/ permasalahan dalam pencapaian target kinerja	Tindak lanjut yang telah/ harus dilakukan	Program	Keg	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK				WTP	WTP	100%									1.Tindak Lanjut Rekomendasi BPK secara Konsisten: Menyusun dan melaksanakan rencana aksi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu. 2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (LKPD/LKKL): Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan meningkatkan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Perbaikan Manajemen Aset dan Inventaris: Melakukan inventarisasi, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) guna mengatasi masalah aset tetap yang sering menjadi temuan.	1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan diantaranya temuan berulang terkait ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. 2. Komitmen Pimpinan dan Manajemen : - Lemahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, sehingga temuan yang sama berulang setiap tahun. - Kurangnya komitmen pimpinan dalam pengawasan dan perbaikan administrasi keuangan.	1. Tindak Lanjut Administratif (Wajib) : Penyelesaian Rekomendasi 60 Hari : Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban/penjelasan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 2. Tindak Lanjut Substansial (Kerugian Negara) : Penyetoran ke Kas Negara/Daerah: Jika ditemukan kerugian negara, instansi wajib menyetorkan ganti kerugian tersebut ke kas negara/daerah. 3. Upaya Mempertahankan WTP (Langkah Strategis) : Proaktif berkoordinasi dengan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi agar penyelesaiannya efektif dan efisien.	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.	1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2.Dokumen RKPD dan RKPD-Perubahan 3. Dokumen RKA, RKA Revisi dan RKA - Perubahan. 4. Dokumen RAK dan RAK -perubahan 5. Dokumen DPA, DPA Revisi dan DPA - Perubahan 6. Dokumen Rencana Strategis (Renstra). 7, Laporan LKJiP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscuting dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 8. Laporan LPPD 9. Laporan LKPJ 10. Laporan LKPD 11. Laporan Evaluasi Triwulan 12. laporan Fisik dan Keuangan 13. laporan RANDA PUG. 14. Lapotan RTP. 15. Laporan Inovasi. 16. Laporan IPKD. 19. Laporan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.	38 Dokumen	38 Dokumen	140.177.448,00	139.018.114,00	99,17
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transperan dan Akuntabel																				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Gaji dan Tunjangan ASN, 1. Laporan Realisasi Anggaran (bulanan) . 2. LK OPD	12 Dokumen	12 Dokumen	14.008.112.151,88	11.882.444.212,00	84,83
																					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Dokumen DUK 2. Dokumen BUZZETING 3. Laporan Inventarisasi BMD 4. Dokumen data kepegawaian (bulanan) 5. Dokumen SKP 6. Dokumen LHKPN 7. Dokumen LHKASN 8. Dokumen SPT Tahunan	19 Dokumen	19 Dokumen	234.292.718,00	186.434.628,00	79,57
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah										78,77					1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1) 2. Optimalisasi Pengalokasian Anggaran (Dimensi 2) 3. Peningkatan Transparansi dan Penatausahaan (Dimensi 3 & 4): 4. Perbaikan Akuntabilitas dan Pengawasan (Dimensi 6)				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tersedia alat listrik, pengadaan sarana dan prasarana, alat tulis kantor, bahan logistik kantor, cetak,makan minum tamu, rapat koordinasi dan konsultasi.	12 Bulan	12 Bulan	453.774.718,00	380.080.423,00	83,76
																					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah pengadaan mebel.	1 paket	1 paket	134.062.045,00	126.949.254,00	94,69
																					6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah jasa pengiriman, material, tagihan air dan listrik.	12 Bulan	12 Bulan	7.918.535.200,00	7.200.582.072,00	90,93
																					7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	Jumlah pembayaran pajak kendaraan roda empat dan dua, BBM, kendaraan dinas yg dipelihara dan gedung kantor yg dipelihara.	12 Bulan	12 Bulan	446.400.458,00	320.131.065,00	71,71
																				2. Pengelolaan Keuangan Daerah.	1.Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.	1. Dokumen KUA 2. Dokumen PPAS 3. Dokumen Perubahan KUA 4. Dokumen Perubahan PPAS 5. Dokumen DPA 6. Dokumen Perubahan DPA 7. Dokumen Nota Keuangan 8. Dokumen Perda 9. Dokumen Perbup APBD 10. Dokumen Nota Keuangan 11. Dokumen Perda 12. Dokumen Perbup APBD Perubahan 13. Dokumen Perbup SHSB 14. Dokumen Perbup Subsidi 15. Dokumen Perbup BKK 16. Dokumen ASB-HSPK	16 dokumen	16 dokumen	1.856.989.844,00	1.545.538.684,00	83,23

																				2. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah.	1. Rekon Kas Bulanan 2. Pencairan DAK Fisik 3. Pencairan DAK Non Fisik 4. SPJD 5. Surat Edaran	60 dokumen	60 dokumen	1.002.551.869,00	910.832.230,00	90,85
																				3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.	1. Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 2. LRA Konsolidasi Bulanan 3. Laporan Semester 4. LKPD TA 2024 5. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 6. Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 7. LHP BPK	29 Laporan	29 Laporan	664.544.846,00	655.677.193,00	98,67
																				4. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.	ADN, DN, BTT, Penyaluran dana bagi hasil	4 Laporan	4 Laporan	172.498.986.669,00	156.711.250.190,00	90,85
																				5. Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.	Dokumen APBD, dokumen APBD perubahan, dokumen DPA, dokumen DPPA, dokumen KUA, dokumen perubahan KUA, dokumen PPAS dan dokumen perubahan PPAS.	41 OPD	41 OPD	508.439.624,00	469.579.967,00	92,36
																			3. Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1. Pengelolaan barang milik daerah.	1.SK SHSB 2. RK BMD 3. Laporan Penatausahaan BMD 4. Laporan Hasil Pengamanan BMD 5. Nilai Barang Hasil Pembongkaran 6. Nilai Barang Hasil Penjualan 7. Nilai Barang Hasil Sewa 8. Nilai Barang Hasil Pemusnahan 9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD 10. Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11. Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12. Laporan Barang Milik Daerah	13 Laporan	13 Laporan	1.413.592.628,00	1.177.550.147,00	83,30
Rata-rata capaian																100%	Rata-rata realisasi					201.280.460.218,88	181.706.068.179,00	90,28

Aro Suka, Januari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SYAMSIR,SE,MM

NIP. 19711109 200501 1 005